



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI WAROPEN
TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
KETERANGAN BAWASLU, DAN PENGESAHAN ALAT
BUKTI)
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 1 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Balikpapan Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Waropen Tahun 2020

PEMOHON

- Zulkifli, Adi Dharma Wiranata, Rinto, Ferdy Yuliansyah, Muhammad Ambran Agus, Muhammad Rizal Fadillah, Iqbal Mulyono, Irisma, Hamjah (62/PHP.KOT-XIX/2021)
- Ollen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri (Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021)
- Yusak Samuel Wonatorey dan Muhammad Imran (Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kota Balikpapan
- KPU Kabupaten Waropen

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Senin, 1 Februari 2021, Pukul 14.06 WIB – 15.49 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

**Haifa Arief Lubis
Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Adi Dharma Wiranata
2. Rinto

B. Termohon Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Noor Thoha
2. Mangara Maidlando Gultom
3. Sapto Hadi Pamungkas

C. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021:

Wawan Sanjaya

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Agus Amri
2. Tomic Minzathu
3. Ahmad Yani

E. Pemohon Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021:

Ollen Ostal Daimboa

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021:

Eva Yulianti

G. Termohon Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021:

Aleksander Wopari

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Pieter Ell
2. Rahman Ramli

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Dhimas Pradana
2. Supriyadi Adi

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Oktovianus Boboy
2. Vega Listian Octavia

K. Bawaslu:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Agustan | (Bawaslu Kota Balikpapan) |
| 2. Wamustofa Hamzah | (Bawaslu Kota Balikpapan) |
| 3. Nikolas Imbiri | (Bawaslu Kab. Waropen) |
| 4. Marice Alfonsina Niki | (Bawaslu Kab. Waropen) |
| 5. Jenny Rahel Mayor | (Bawaslu Kab. Waropen) |
| 6. Amandus Situmorang | (Bawaslu Prov. Papua) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara 62/PHP.KOT-XIX/2021, dan Perkara 99/PHP.BUP-XIX/2021, dan 106/PHP.BUP-XIX/2021, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, sama, sebagaimana persidangan yang pertama. Persidangan yang kedua, juga kita patuh dengan protokol kesehatan, sehingga durasinya sangat singkat, sesingkat mungkin. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, supaya nanti bicara efisien, ringkas, ya, pokok-pokoknya saja. Yang tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan. Seluruh dokumen sudah disampaikan tadi? Belum? Oke. Kalau begitu, tolong dikumpulkan, ya, dan langsung dibagikan 7 eksemplar dari Termohon, dari Pemohon ... dari Bawaslu, dan dari Pihak Terkait. Jadi, di sini ada tiga perkara, tapi dua daerah. Daerah Kota Balikpapan dan Kabupaten Waropen, ya.

Kalau ada bukti tambahan, sekaligus silakan disampaikan.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO

Mohon izin, Mahkamah. Perkara Nomor 62/PHP.BUP-XIX/2021 Kota Balikpapan.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO

Pemohon.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO

Sebagaimana yang disampaikan Mahkamah kemarin, kami diminta untuk melengkapi, menambah dua alat bukti. Dan kemarin, kami diminta oleh Panitera ada saat persidangan untuk menyerahkan flashdisk daftar

bukti. Karena kemarin baru bentuk fisiknya yang kami sampaikan dan di hari ini kami ingin menyerahkan flashdisk yang berisi tentang daftar bukti tambahan.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Flashdisk-nya saja?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO

Flashdisk-nya saja, Mahkamah.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Fisiknya sudah, ya?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO

Sudah, Mahkamah.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sudah, duduk di situ nanti diambil.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO

Baik, terima kasih.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, bukti fisiknya sudah, tapi hanya berupa flashdisk, ya?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO

Benar, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Dan sudah dianu kemarin, disahkan, ya?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO

Sudah, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, sambil menunggu yang lain, diambil dulu! Ya, jadi dibagikan kepada tiga orang Hakim, Panitera Pengganti, Arsip, kemudian Para Pihak. Ya, tadi lupa, Pak Wir, ya, enggak diminta terlebih dahulu. Menunggu, kita mulai dari Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021. Ini 62/PHP.KOT-XIX/2021 juga menyerahkan Surat Kuasa khusus ini, ya?

18. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum, ya, kemarin?

20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Ya, sudah kami serahkan, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang kita mulai, Saudara Pemohon ... eh, Termohon, mengajukan Eksepsi?

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Siap, Yang Mulia, mengajukan.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eksepsi berkenaan dengan apa?

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Yang pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa Mahkamah tidak berwenang?

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Yang pertama karena sebagaimana PMK Nomor 6 Tahun 2020. Menurut hemat kami, Pokok Permohonan itu harusnya memuat Alasan-Alasan Permohonan yang pada pokok-pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Sementara (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap ... dianggap dibacakan.

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Siap, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, kemudian?

32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa tidak memiliki Kedudukan Hukum?

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Karena Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan Permohonan, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus kemudian, mestinya ambang batas menurut Pasal 158, berapa mestinya?

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Untuk konteks Pilkada Kota Balikpapan itu 1% paling banyak, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

1%?

38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Atau kalau ditotal sebesar 2.575 suara, Yang Mulia, maksimal.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Padahal selisih antara Termohon ... Pemohon dan Pihak Terkait, berapa?

40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Sebentar, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, 64.287, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, dia tidak punya Legal Standing?

42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya, saya lupa memper ... minta memperkenalkan diri, soalnya tadi ada disela-sela harus mengumpulkan (...)

44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berkasnya itu. Ya, mestinya sebelum persidangan dimulai, itu sudah dikumpulkan, ya, diminta di Kepaniteraan.

Baik, Pemohon Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021, siapa yang hadir?

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO

Baik, terima kasih, Mahkamah. Dalam Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021, saya Rinto bersama rekan saya Adi Dharma Wiranata yang hadir di dalam persidangan ini sebagai Prinsipal, Yang Mulia. Terima kasih.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, kemudian Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021: EVA YULIANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir bersama kami Kuasa Hukum, yaitu Prinsipal kami, Bapak Ollen Ostal Daimboa dan saya sendiri Eva Yulianti selaku Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: OKTOVIANUS BOBOY

Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir Kuasa dari Pemohon atas nama Kuasa, Oktavianus Boboy dan Vega Listian.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Termohon Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021 tadi sudah bicara, tadi siapa?

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Baik, terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia. Hadir selaku Kuasa Hukum, saya Wawan Sanjaya bersama dengan Ketua KPUD Kota Balikpapan, Bapak Noor Thoha. Dan hadir secara daring seluruh Komisioner KPU Kota Balikpapan, Yang Mulia, bersama Kuasa Hukum Termohon, Bapak Mangara Maidlando Gultom dan Bapak Sapto Hadi Pamungkas, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Termohon Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021?

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAN RAMLI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 dari KPU Kabupaten Waropen. Hadir, Bapak Dr. Pieter Ell, bersama Rahman Ramli, dan juga Prinsipal, Bapak Ketua Komisioner KPU Kabupaten Waropen. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini Pak Pieter Ell sekarang sudah doktor? Selamat, ya, Pieter Ell. Kemarin waktu kita sering bertemu di persidangan belum doktor, sekarang sudah doktor?

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Siap, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, selamat, ya.

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Termohon Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021?

60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Sama, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama, ya?

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Ya.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, Pihak Terkait?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya izin memperkenalkan diri dari Pihak Terkait ... dari Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara dalam Register Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021. Saya Agus Amri bersama dengan rekan saya di belakang, Tomic Minzhatu. Dan hadir secara daring, Bapak Ahmad Yani. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, Pihak Terkait Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021?

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021, hadir Kuasanya atas nama Dhimas Pradana dan Supriyadi. Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021, Pihak Terkait? Sama, ya?

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Sama, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua-duanya, ya?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Ya.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Bawaslu Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021?

72. BAWASLU KOTA BALIKPAPAN: AGUSTAN

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dalam sidang hari ini, saya Ketua, Agustan, dan Anggota Bapak Wamustofa Hamzah. Dan juga diikuti secara daring seluruh Anggota Bawaslu Kota Balikpapan. Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini juga mewakili Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021, ya? Oh, Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 sekarang, Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 dulu.

74. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: AMANDUS SITUMORANG

Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin. Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama, ya?

76. BAWASLU PROVINSI PAPUA: AMANDUS SITUMORANG

Hadir Bawaslu Provinsi Papua. Kemudian, dari Bawaslu Kabupaten Waropen. Juga melalui daring di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten. Demikian, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kita lanjutkan ke Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021.

78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Baik, mohon izin, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Terkait dengan yang tadi, Yang Mulia, tanyakan itu telah kami tuangkan di halaman 6, selisih suara adalah sebesar=64.287 suara atau akumulasi 24,9%, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, berarti tidak punya Legal Standing, ya? Karena tidak memenuhi Pasal 158?

82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Betul, Yang Mulia. Kemudian Eksepsi yang ketiga, itu terkait dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Obscur, ya, Permohonannya?

84. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Ya, Yang Mulia. Karena di dalam Posita Pemohon, yang diajukan pembatalan oleh Pemohon itu bukan merupakan SK berkaitan dengan penetapan, melainkan SK akreditasi Pemohon sendiri, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Diulangi, apa? Pemohon kabur karena objeknya?

86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Objeknya keliru, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Error?

88. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Jika dicermati, pokok Permohonan ... objek Permohonan yang ingin dibatalkan oleh Pemohon itu bukan merupakan surat keputusan berkaitan dengan penetapan paslon, tapi berkaitan dengan akreditasi Pemohon sendiri, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke nanti kita cek, ya?

90. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Terdapat di Posita Pokok Permohonan Pemohon, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, itu akreditasi dari?

92. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Pemohon sendiri, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon yang nomornya berapa itu? Nomor 263 itu?

94. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Nomor 2 ... 452, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 2 (...)

96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

452.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

452.

98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Ya, Yang Mulia. Sementara, untuk penetapan pemilihannya (...)

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Penetapannya, Nomor 263, kan?

100. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Ya, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Semestinya, yang benar objeknya adalah Nomor 263?

102. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Nomor 263. Tapi (...)

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi (...)

104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Dalam Posita Pemohon, yang minta dibatalkan itu Nomor 452, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 452?

106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Ya. Itu kalau di bukti (...)

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti T-6 itu, ya?

108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Bukti T-6, betul, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Terus?

110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Ya, Yang Mulia. Itu tiga poin Eksepsi kami, Yang Mulia.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus, Pokok Permohonan?

112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Ya, mohon izin untuk selanjutnya, Pokok Permohonan.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pokok-pokoknya saja!

114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Oke. Pokoknya yang pertama itu, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah berperilaku tidak adil kepada Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

Bahwa dalam menjalankan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020, Termohon selalu bertindak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya berkaitan dengan pemantau pemilihan dalam pemilihan yang hanya diikuti satu pasangan calon atau dikenal dengan calon tunggal, dimana Termohon telah memberikan hak-hak yang memang menjadi hak Pemohon salah satu pemantau pemilihan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

Bahwa pemberian hak Pemohon oleh Termohon diawali pada tanggal 17 September 2020, Pemohon melengkapi formulir pendaftaran sebagai pemantau dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020. Atas hal tersebut, pada tanggal 15 Oktober 2020, Termohon menerbitkan Sertifikat Akreditasi Pemantau Nomor 452 sekian, vide Bukti T-6, kepada Pemohon yang diterima Pemohon pada tanggal 21 Oktober tahun 2020.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, narasi yang seterusnya dianggap telah dibacakan.

116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Dianggap dibacakan.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang bantahan terhadap Pokok Permohonan. Langsung halaman (...)

118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Kemudian ... ya, izin, Yang Mulia. Di halaman 21 poin 42.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Bahwa pada tanggal 14 November 2020, Pemohon mengirimkan Surat Nomor 007 sekian, vide Bukti T-13, kepada Pemohon terkait dengan permintaan data daftar nama PPK, PPS, dan KPPS. Bahwa terkait dengan surat Pemohon tersebut, melalui Surat Nomor 629 sekian, Termohon telah memenuhi permintaan data yang dilampiri berupa SK KPU Kota Balikpapan tentang Pengangkatan PPK se-Kota Balikpapan, SK KPU Kota Balikpapan tentang Pengangkatan PPS dan tentang Pengangkatan KPPS se-Kota Balikpapan, Bukti T-9.

Kemudian poin 43, halaman 21. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, Pemohon mengirimkan Surat Nomor 09 sekian, Bukti T-14, perihal permintaan data terkait dengan laporan penerimaan sumbangan kampanye dan daftar nama perusahaan yang telah memberikan sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon. Atas surat tersebut, kemudian Termohon pada tanggal ... pada bulan Desember tahun 2020 melalui Surat Nomor 617 sekian, menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan awal dana kampanye atau laporan penerimaan sumbangan dana kampanye peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 telah termuat di laman website KPU Kota Balikpapan alamat www.kotabalikpapan.kpu.go.id, vide Bukti T-10.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ya, itu semuanya berkaitan dengan itu dianggap telah dibacakan.

122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Oke, baik, Yang Mulia. Kemudian, Pokok Permohonan terkait Pemohon telah melaporkan kampanye media sosial, Instagram, dan medsos kepada Bawaslu, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Bahwa berkaitan dengan kampanye melalui media sosial yang dilakukan oleh seseorang dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 yang telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kota Balikpapan namun tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Balikpapan adalah dalil yang tidak tepat. Karena seharusnya, dalil Permohonan yang diajukan kepada Mahkamah adalah

dalil yang berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar oleh Termohon.

Bahwa berkaitan dengan tidak ditindaklanjutinya pengaduan Pemohon kepada Bawaslu Kota Balikpapan. Apabila Pemohon merasa tidak puas, seharusnya Pemohon menyelesaikannya melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, bukan justru memasukkannya sebagai dalil dalam Posita Permohonan ini.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti Bawaslu merespons ini, ya! Kenapa tidak menindaklanjuti ini? Terus?

124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Ya, terkait halaman 26, Yang Mulia. Mengenai pada dalil Pemohon pada tanggal 9 Desember 2020, Pemohon diperlakukan tidak adil karena Pemohon tidak diberikan hak untuk berbicara pada pleno tingkat kecamatan dan tidak diberikan salinan Form C-KWK.

Kami menanggapi pada poin 54, halaman 26. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 merupakan tanggal pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Wali Kota Balikpapan Tahun 2020. Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal apabila tanggal 9 Desember 2020 Pemohon mendalilkan tidak diberikan hak suara pada saat pleno di tingkat kecamatan. Karena pleno di tingkat kecamatan baru dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 20 Desember tahun 2020. Sori, diulangi, Yang Mulia. Tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 Desember tahun 2020.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Kemudian, poin 55. Bahwa perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu bahwa alasan utama Pemohon tidak mendapatkan Form C Hasil Salinan KWK di tingkat PPS adalah karena pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020, Pemohon tidak menempatkan pemantau di setiap TPS. Apabila pemantau menempatkan pemantau di setiap TPS, tentu pemantau akan mendapatkan haknya untuk memperoleh Form C Hasil Salinan KWK dari petugas KPPS di setiap

TPS. Hal tersebut nampaknya didasari jumlah pemantau yang Pemohon daftarkan hanya sebanyak 21 orang (...)

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Padahal berapa TPS?

128. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

1.525, Yang Mulia.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT

525?

130. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

1.505, Yang Mulia.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT

1.000?

132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

505

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT

505 TPS?

134. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Ya. Sementara jumlah pamantaunya 21 orang, Yang Mulia.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus?

136. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Ya. Kemudian bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19A ayat (2) PKPU Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan bahwa ... bahwa dalam hal saksi atau pemantu pemilihan dalam negeri tidak hadir dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Formulir Model C Hasil Salinan KWK dapat diperoleh di PPS. Oleh karena tidak ada pleno pada tingkat PPS, maka PPS menyerahkan Formulir Model C Hasil Salinan KWK kepada pemantau pada saat pleno di tingkat kecamatan. Bahwa pada faktanya, pemantau telah menerima Formulir Model C Salinan Hasil KWK yang diserahkan di pleno kecamatan.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, terimanya di tingkat kecamatan?

138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Di tingkat kecamatan, Yang Mulia. Karena (...)

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu diterima?

140. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Ya, Yang Mulia.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada buktinya?

142. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Ada, Yang Mulia. Kami lampirkan di dalam daftar alat bukti kami, Yang Mulia.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti T berapa? T berapa?

144. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Bukti T-32 berikut (...)

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti T-23 sampai Bukti T-28 itu?

146. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Ya, Yang Mulia.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

148. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Beserta keterangannya.

Kemudian, pemantau mendalilkan mengenai selisih Permohonan suara disebabkan Termohon tidak optimal dalam melakukan sosialisasi pemilihan, sehingga menyebabkan golput mencapai 40% lebih.

Bahwa Termohon membantah tidak optimal dalam melaksanakan sosialisasi karena Termohon telah optimal melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan berbagai macam metode dan telah menyentuh seluruh basis pemilih. Adapun sosialisasi tersebut dilaksanakan sebagai berikut.

Yang pertama. Pemasangan atau pemberian bahan sosialisasi Pilkada Balikpapan Tahun 2020 telah kami jabarkan dalam Bukti T-33, Yang Mulia.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

150. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Kemudian, kegiatan sosialisasi pelaksanaan Pilkada Balikpapan Tahun 2020 melalui iklan media telah kami jabarkan melalui Bukti T-34, Yang Mulia.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

152. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Kemudian, kegiatan sosialisasi pelaksanaan Pilkada Balikpapan Tahun 2020 secara langsung, Bukti T-35.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

154. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Bahwa kegiatan sosialisasi yang telah Termohon lakukan dengan berbagai macam metode, menunjukkan bahwa Termohon sudah semaksimal mungkin melakukan rangkaian kegiatan yang bertujuan utama untuk meningkatkan partisipasi pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

Bahwa Pilkada Balikpapan Tahun 2020 yang dilaksanakan Termohon, juga telah menunjukkan tren kenaikan partisipasi pemilih dari tahun ke tahun dengan uraian sebagai berikut.

Pada Pilkada Tahun 2011, partisipasi pemilih sebesar=226.801 suara pemilih, dengan persentase 56,31%. Pada Pilkada Tahun 2015 dengan partisipasi pemilih sebesar=271.765 pemilih, dengan partisipasi 59,11%. Pada Pilkada Tahun 2020 dengan partisipasi pemilih=266.536 pemilih atau 59,47%.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

156. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Bahwa mengenai terjadi pelanggaran di TPS 28 Kelurahan Manggar Baru yang tidak melakukan verifikasi terkait e-KTP, sehingga ditemukan warga memilih dengan menggunakan C-6, akan kami jawab sebagai berikut pada halaman 37 poin 70.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

158. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Bahwa terkait adanya dalil dugaan pelanggaran di TPS 28 Kelurahan Manggar Baru yang tidak melakukan verifikasi terkait dengan e-KTP, sehingga ditemukan warga memilih dengan menggunakan C-6 adalah merupakan dalil yang tidak beralasan dan merupakan asumsi Pemohon saja.

Bahwa fakta sebenarnya terhadap hal tersebut ialah ketua KPPS pada hari pemungutan suara mengingatkan pada seluruh pemilih di TPS 28 agar selain membawa Formulir C Pemberitahuan KWK, juga harus menunjukkan KTP elektronik. Atas hal tersebut, beberapa pemilih yang lupa membawa e-KTP elektronik pulang ke rumah untuk mengambil KTP elektroniknya masing-masing.

Bahwa selain itu, apabila menurut Pemohon terjadi dugaan pelanggaran di tingkat TPS, seharusnya Pemohon ada menyampaikan keberatan kepada Termohon. Tapi dari mulai tingkat ... pleno tingkat kecamatan hingga tingkat kota, Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan tersebut. Selain itu, terhadap dugaan pelanggaran tersebut jika memang benar ada, seharusnya juga Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini tidak ada laporan?

160. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Tidak ada, Yang Mulia.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

162. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Ya. Penutup terakhir. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon a quo tidaklah berdasar dan sangatlah beralasan bagi Mahkamah untuk menolaknya.

Petitum (...)

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Petitum.

164. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Berda ... berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 263 sekian, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tata letak pasangan calon, kolom kiri, kolom kosong, perolehan suara=96.642. Kolom kanan, Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz sebesar=160.929 suara, dengan jumlah suarah sah=257.571.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon Wawan Sanjaya, S.H., M.H., Mangara Maidlando Gultom, S.H., M.H., Sapto Hadi Pamungkas, S.H., M.H.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

166. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Terima kasih, Yang Mulia.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Yang Mulia, Pak Manahan, ada? Cukup? Prof. Saldi? Cukup?

Baik. Sekarang kita mendengarkan keterangan Pihak Terkait. Silakan, Pihak Terkait!

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Terima kasih, Yang Mulia.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda ada Eksepsi?

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Kami mengajukan Eksepsi dalam perkara a quo terkait beberapa poin.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, pokok-pokoknya saja, Eksepsinya tentang apa?

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Baik, Yang Mulia, yang terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Bahwa dalam Permohonannya ... dalam Pokok Permohonannya, ini terkait ambang batas, Yang Mulia, dimana seharusnya dalam hal ambang batas ini sudah melampaui dari 1%.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Seperti itu. Selanjutnya, ini bertentangan dengan Pasal 158 huruf c. Selanjutnya (...)

177. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Keberatan, Mahkamah.

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

179. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO

Perkara Nomor 62/PHP.BUP-XIX/2021.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon tidak bisa menyampaikan apapun sekarang.

181. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO

Mohon izin.

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

183. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO

Apa kami tidak diperkenankan untuk mendapatkan salinan jawaban Pihak Terkait?

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, tadi sudah (...)

185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Seharusnya ada.

186. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO

Belum ada kami terima, Mahkamah.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Dari Pihak Terkait perkara (...)

188. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO

Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021, Mahkamah.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021?

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Sudah kami serahkan tadi, Yang Mulia, ke Petugas.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, itu bagaimana itu? Ada, enggak?

192. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO

Ini baru KPU dan Bawaslu Kota Balikpapan.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang ini?

194. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO

Yang itu belum ada, Mahkamah.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum diserahkan atau keliru? Anda terima apa? Hanya 2 itu?

196. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.BUP-XIX/2021: RINTO

Hanya 2, Mahkamah. Yang pertama itu keterangan (...)

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ya, maaf kalau begitu belum dapat, ya. Berarti apa yang ... ada yang dapat? Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021 tadi menyerahkan berapa eksemplar?

198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Kami ada serahkan 4 tadi, Yang Mulia.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT

4? Oh, hanya 4 jelas kurang, mestinya 7.

200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

7.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jangan pelit-pelit amat. Menurut PMK=7.

202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Oke. Ini ada, Yang Mulia. Mohon izin Petugas untuk (...)

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu ada, Petugas, tolong diambil!

204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Ini diserahkan, mohon maaf, tadi memang (...)

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini bosnya turun sendiri, jadi sampai begini. Ini kalau di pemerintah daerah, Beliau sudah ... jabatannya sudah sekda, ini turun sendiri sampai. Terima kasih, Pak Wir.

Nanti yang belum dapat berarti siapa, Bawaslu? Bawaslu? Ya, nanti dikopikan dahulu sebentar, ya! Mohon maaf.

Silakan, dibacakan!

206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Mohon maaf atas kesalahan kami, Yang Mulia. Kami lanjutkan terkait tentang poin-poin yang ada dalam Eksepsi kami. Tadi terkait ambang batas melampaui dari 1% (...)

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu satu.

208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Siap. Selanjutnya, dalil Pemohonnya lebih banyak yang mengajukan tentang bentuk-bentuk ketidakadilan, yang menurut hemat kami itu seharusnya menjadi ranah Bawaslu dan ranah DKPP, bukan merupakan ranah dari Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya ... poin selanjutnya. Bahwa tentang pembatalan keputusan itu, seharusnya juga terkait produk keputusan itu seharusnya diajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (...)

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua dan seterusnya.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang halaman 11, itu sudah. Mengenai tenggang waktu, bagaimana?

212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Terkait Legal Standing juga, saya kira normatif.

Nah, terkait ini yang paling krusial sesungguhnya terkait ambang batas, ya. Dimana dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020, dimana pada kolom sebelah kiri, kolom kosong dengan perolehan suara 96 (...)

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, itu sudah, dianggap dibacakan.

214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Baik.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, tidak memenuhi persyaratan Pasal 158?

216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Betul sekali, Yang Mulia.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Kami akan lanjut lagi pada terkait tenggat waktu.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 14.23 WITA. Maka dengan demikian, tenggat waktu 3x24 jam untuk mengajukan Permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 14.23 WITA sampai dengan tanggal 19 Desember 2020, pukul 14.23 WIB, jadi bukan Waktu Indonesia Tengah.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini tenggang waktu itu 3 hari, 3x24 jam.

222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

3x24 jam.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Baik.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Selanjutnya untuk ... bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya masih dalam tenggat waktu.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, oke. Terus, yang berikutnya?

228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Yang berikutnya terkait Permohonan tidak jelas atau Permohonan (...)

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Obscur.

230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Tidak jelas atau obscur. Betul sekali, Yang Mulia.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa obscur?

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Bahwa Permohonan tidak jelas dikarenakan bahwa berdasarkan Pasal 8 dan seterusnya, Petitem memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Selanjutnya. Bahwa setelah mempelajari secara cermat dan saksama seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata tidak jelas atau kabur (...)

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Sebagaimana yang tertuang dalam (...)

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang dalam Pokok Permohonan. Saudara menyandingkan, gitu, ya?

236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Kami .. ya (...)

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mulai halaman 15.

238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Betul, Yang Mulia. Agar lebih menyederhanakan dan memudahkan untuk pemeriksaan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan, maka kami menyusunnya dalam model tabel disandingkan, head to head.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Di sini ada beberapa poin. Mohon izin, Yang Mulia.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Apakah perlu kami bacakan satu per satu (...)

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan.

244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Atau ... ya.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda pokoknya saja, dalil Pemohon itu yang 1, 2, 3, 4, 5 itu tentang apa? Anda merespons apa?

246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Oke, terkait pada poin-poin yang diajukan dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon pada poin 1, 2, 3, 4, dan 5, maka kami

menyatakan bahwa proses pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan keberadaan KIPP atau Pemohon tidak pernah mendapatkan intervensi, baik langsung maupun tidak langsung dari Termohon maupun dari Pihak Terkait. Terus (...)

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus!

248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Permohonan dalil tersebut merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang tepat secara tidak langsung menuduh Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran hukum selama proses pemilihan wali kota dan seterusnya.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Apabila Pihak Pemohon tidak merasa puas atas segala laporan yang dibuat ke Bawaslu atau ke Kota Balikpapan, Pihak Pemohon dapat mengadukannya kepada DKPP. Dimana DKPP merupakan penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemilihan terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas, dan seterusnya.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu halaman 17-18, ya?

252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Pada 18 dan seterusnya.

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus sekarang yang ketiga dalil 5, 7, 8, 9 itu.

254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Betul sekali, Yang Mulia. Untuk pada halaman 5 di angka 7, 8, dan 9, dalil Pemohon tersebut tidak relevan, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak karena proses penghitungan suara telah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kecamatan pada bagian yang kami garis bawah, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikatakan sebagai tuntutan yang dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri, dimana perolehan suara Pihak Terkait telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Selanjutnya. Dalam Formulir C-6 merupakan pemberitahuan yang hanya menegaskan atau menginformasikan bahwa pemilih tersebut namanya siapa, alamatnya di mana, dan seterusnya, yang nantinya pemilih bisa memilih di TPS nomor berapa dan telah tercatat sebagai DPT, sehingga dapat mencoblos.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa C-6 bukan salah satu syarat untuk mencoblos, sehingga apa yang didalilkan oleh Termohon tidak memiliki dasar hukum.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Selanjutnya, pada poin 4, sudah kami nyatakan seperti ... sudah langsung kami tanggap. Terkait tentang kapasitas dan Sekretaris KIPP Balikpapan yang sebagaimana dinyatakan tadi oleh Pihak KPU sebagai Pemohon.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini dibacakan coba, yang nomor 4 ini dibacakan!

260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Baik, saya akan bacakan, ya. Ini mengulang dan serupa dengan apa yang disampaikan. Bahwa dalam Permohonan Pemohon terdiri dari 9 orang dan secara jelas menyatakan diri sebagai Pemohon dalam perkara a quo. Akan tetapi, yang membubuhkan tanda tangan pada akhir Permohonan hanya 2 orang, yakni ketua dan sekretaris. Seharusnya, para Pemohon ikut menandatangani Permohonan a quo karena telah mengatasnamakan dirinya sebagai Pemohon. Sehingga kapasitas ketua dan Sekretaris KIPP Balikpapan tidak dapat mewakili kepentingan hukum yang lainnya, kecuali terdapat ketentuan lain.

Berdasarkan hal tersebut, kiranya Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang terakhir.

262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Terakhir. Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait secara tegas, Pihak Terkait menyatakan menolak untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang Petitumnya!

264. BAWASLU KOTA BALIKPAPAN: AGUSTAN

Pada bagian keenam, Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon dalam mahkam ... kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dua. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 dan seterusnya.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 263 dan seterusnya tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, pukul 14.23 WITA.

Menetapkan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

a. Kotak kosong sebelah kiri meraih suara sebesar sebanyak 96.642.

b. Pasangan kolom sebelah kanan atas nama Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz, S.H. meraih suara sebanyak=160.929 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait Agus Amri, S.H., M.H., C.L.A., Tomic Minzhatu, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Prof. Saldi, ada? Cukup? Yang Mulia, ada? Cukup? Baik. Terima kasih Pihak Terkait Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021.

Sekarang yang terakhir dari Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021 dari Bawaslu. Dari Bawaslu, saya minta klarifikasi saja. Apakah ada hal yang penting yang berupa laporan dari Pemohon atau dari pihak lain yang masuk?

266. BAWASLU KOTA BALIKPAPAN: AGUSTAN

Ya, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya.

Kami izin menyampaikan terkait dengan Pokok Permohonan ini. Kami sedang merangkum, ada 5 poin terkait dengan Pokok Permohonan, Yang Mulia.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

268. BAWASLU KOTA BALIKPAPAN: AGUSTAN

Yang pertama, terkait dengan Pokok Permohonan 1 sampai dengan 5. Telah kami jelaskan bahwasanya Bawaslu tidak pernah menolak semua terkait dengan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

270. BAWASLU KOTA BALIKPAPAN: AGUSTAN

Yang kemudian, yang kedua. Terkait dengan Pokok Permohonan pada angka 6 huruf a terkait dengan laporan kampanye di media sosial. Pada prinsipnya, Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran dengan status hasil tentang pelanggaran dinyatakan dihentikan karena tidak diketahui identitas pelapor. Namun, kami pun menjadikan itu sebagai temuan, yang kemudian kami melakukan penyusunan. Dan pada akhirnya, pada saat penyusunan juga tidak ditemukan identitas pemilik akun tersebut, sehingga kasus dinyatakan dihentikan.

Yang berikut, poin ketiga. Terkait dengan Pokok Permohonan pada angka 6 huruf b dan c terkait dengan laporan Pemohon tentang permintaan data berupa petugas yang ... apa ... tidak memberikan data, baik itu data ... data sumbangan dana kampanye, Form C Hasil, mereka telah melakukan ... mereka melaporkan kepada Bawaslu dan hasil penanganan kedua pelanggaran tersebut tertulis syarat telah terjadi pelanggaran administrasi dan telah kami teruskan kepada Termohon.

Yang berikutnya, terkait dalil Permohonan pada angka 6 huruf d (...)

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sudah diteruskan ke Termohon. Terus, apa yang dilakukan oleh Termohon?

272. BAWASLU KOTA BALIKPAPAN: AGUSTAN

Sudah ditindaklanjuti, Yang Mulia.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tindak lanjuti (...)

274. BAWASLU KOTA BALIKPAPAN: AGUSTAN

Dan memberikan data tersebut.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tindak lanjutinya berupa apa itu oleh Termohon?

276. BAWASLU KOTA BALIKPAPAN: AGUSTAN

Memberikan data yang di ... diberikan (...)

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah diberikan datanya?

278. BAWASLU KOTA BALIKPAPAN: AGUSTAN

Sudah diberikan, Yang Mulia.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus!

280. BAWASLU KOTA BALIKPAPAN: AGUSTAN

Yang kemudian P-4. Pada Pokok Permohonan nomor 6 huruf d terkait dengan masih adanya kampanye di media sosial dan juga telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Balikpapan. Dan status hasil penanganan pelanggaran, terbukti terpenuhi pelanggaran administrasi pemilihan yang kemudian juga diteruskan kepada KPU Kota Balikpapan untuk kemudian melakukan perbaikan pada pemilihan yang akan datang.

Sedangkan laporan Pemohon tentang masih terpasangnya atribut dan alat peraga kampanye pasangan calon yang telah dilakukan serangkaian penanganan pelanggaran, namun dihentikan karena tidak memenuhi unsur terkait dengan syarat materiil berupa tidak dilengkapi uraian kejadian yang disampaikan oleh Pemohon.

Dan yang terakhir. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 9 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran di suatu TPS, yang kemudian hasil pengawasan Bawaslu Kota Balikpapan bahwa tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Dan terhadap hal tersebut, juga tidak ada temuan maupun laporan yang diterima oleh Bawaslu Kota Balikpapan. Demikian, Yang Mulia.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang Bukti PK-15 itu?

282. BAWASLU KOTA BALIKPAPAN: AGUSTAN

PK-15, Yang Mulia, ya.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Untuk ... anu ... keterangan tambahan di luar Pokok Permohonan, enggak ada? Anda ... apa yang ... apa yang itu?

284. BAWASLU KOTA BALIKPAPAN: AGUSTAN

Ya. Terkait dengan keterangan tambahan, Yang Mulia. Bahwasannya Bawaslu Kota Balikpapan telah melakukan tugas terkait dengan pengawasan dan juga terkait dengan penanganan pelanggaran.

Bahwasannya selama proses Pilkada Kota Balikpapan, Bawaslu telah menerima 20 laporan dugaan pelanggaran.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

286. BAWASLU KOTA BALIKPAPAN: AGUSTAN

Ya.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang semuanya dianggap dibacakan.

288. BAWASLU KOTA BALIKPAPAN: AGUSTAN

Ya, Yang Mulia.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ber ... yang tidak berkaitan dengan Permohonan dalil Pemohon juga semuanya sudah dilaksanakan, ya?

290. BAWASLU KOTA BALIKPAPAN: AGUSTAN

Siap, Yang Mulia, sudah.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Bawaslu. Ada dari Prof. Saldi? Cukup. Yang Mulia Pak Manahan? Cukup, ya. Baik kalau begitu, untuk Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021 sudah selesai.

Sekarang kita ke Kabupaten Waropen. Kita mulai dari Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 dulu, ya.

292. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Terima kasih.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Secara ringkas, KPU Termohon, siapa yang akan menyampaikan?

294. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Terima kasih, Yang Mulia.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

296. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Terkait dengan Permohonan Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 atas nama Ollen Ostal Daimboa dan Pasangan Yeheskiel Imbiri, Termohon selaku KPU Kabupaten Waropen menyampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut.

Yang pertama, di poin pertama itu Eksepsi. Namun sebelumnya ada renvoi sedikit, Yang Mulia.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

298. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Pada halaman 2, dalam Eksepsi ambang batas itu tertulis selisih 14.668, seharusnya 6.539.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di halaman berapa itu?

300. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Halaman 2, Yang Mulia.

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 2.

302. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Ambang batas tertulis 14.668, seharusnya 6.539. Kemudian, persentasenya 17,26%, seharusnya 20,35%.

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

304. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Itu saja, Yang Mulia.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kesimpulannya tidak memenuhi ambang batas, ya?

306. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Benar, Yang Mulia.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

308. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Kemudian yang kedua, soal Eksepsi kewenangan. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

310. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Kemudian, yang berikut soal Pokok Perkara. Yang pertama, itu terkait dengan merit system oleh Pihak Terkait.

Bahwa Termohon tidak pernah mendapat rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan merit system karena Termohon sendiri sudah melakukan klarifikasi ke komisi ASN pusat, kemudian juga menyurat ke Pemda Kabupaten Waropen, dan tidak ada klarifikasi, dan juga tidak ada rekomendasi dari Bawaslu.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

312. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Yang berikut, terkait dengan pembagian Rp10.000.000,00 per kepala keluarga dan juga digabungkan dengan adanya sistem noken di salah satu TPS di Distrik Wapoga, di Kampung Sewa Merare. Itu Termohon menolak karena Kabupaten Waropen tidak masuk dalam penggunaan sistem noken.

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sistem noken, ya?

314. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Ya.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

316. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Kemudian, tuduhan berikut soal ASN melakukan money politics. Kemudian, adanya penduduk ... penduduk yang melakukan pencoblosan dari luar Waropen, itu tidak benar juga dan ... karena tidak ada rekomendasi atau temuan dari Bawaslu.

Kemudian, adanya ASN atau kepala dinas yang memilih di beberapa TPS dan melakukan mobilisasi pemilih, itu tidak benar juga. Karena memang tidak ada rekomendasi dari Bawaslu, Yang Mulia.

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

318. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Terkait dengan itu, hal-hal lain yang belum kami jelaskan dianggap dibacakan. Dan kami menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon.

Dan terakhir, dalam Petitum kami.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu termasuk yang ASN sudah dijelaskan, ya?

320. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Ya.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Termasuk anu ... Kepala Puskesmas Waropen Bawah sudah, ya?

322. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Betul, Yang Mulia. Bahwa tidak ada rekomendasi dari Bawaslu.

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Surat suara orang yang sudah meninggal dipakai di TPS 1 Kampung Paradoi juga sudah dijawab?

324. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Ya, sudah dijawab, Yang Mulia.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada laporan itu?

326. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Tidak ada laporan.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang, Petitemnya!

328. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Petitemnya yang pertama. Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 411/PL dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 yang benar adalah:
 - 1) Nomor Urut 1 Hendrik Wonatorey dan pasangan, perolehan suara=3.751.
 - 2) Nomor Urut 2=1.861.
 - 3) Nomor Urut 3=9.990.
 - 4) Nomor Urut 4=16.529.

Jumlah suara sah=32.131.

Demikian jawaban Termohon KPU Kabupaten Waropen dalam Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

330. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Terima kasih, Yang Mulia, lanjut. Ini borong, Yang Mulia.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar! Ini Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 dulu!

332. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Oh, ya, siap, Yang Mulia.

333. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Masih Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 tadi dari Pihak Termohon, itu di dalam ... di halaman ... halaman 5 poin f itu mengatakan bahwa walaupun tidak memiliki Kedudukan Hukum, namun Pemohon masih mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ini, 1, 2, 3, 4. Ini apakah tidak ditanggapi dalam jawaban ini?

334. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Terima kasih, sudah ditanggapi, Yang Mulia.

335. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di bagian mana? Poin 1, 2, 3, 4 ini ditanggapi di mana oleh Pihak Termohon?

336. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Di Pokok Perkara, Yang Mulia.

337. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, di (...)

338. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Jadi itu pengantar dari Pemohon.

339. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, pengantar itu?

340. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Ya, nanti kami tanggapikan sekaligus dalam Pokok Perkara.

341. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di dalam Pokok Perkara, sudah?

342. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Ya, sudah, Yang Mulia.

343. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di halaman berapa kira-kira? Yang terutama mengenai soal pailit itu? Poin 1 itu tanggapannya di halaman berapa?

344. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Di halaman 11, Yang Mulia.

345. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 11, ya?

346. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Ya. Halaman 11. Bahwa tidak benar Pemohon tentang dugaan keadaan pailit karena pasangan calon tidak dalam keadaan pailit, sebagaimana surat keterangan dari Pengadilan Niaga Makassar dan seterusnya, Yang Mulia.

347. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, terima kasih. Cukup, Yang Mulia.

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Yang Mulia Prof. Saldi? Silakan, yang berkenaan pailit itu.

349. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah, ya?

350. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

351. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ini ada dua fakta sih sebetulnya, KPU, di ... apa ... didalilkan ini pailit berdasarkan putusan pengadilan nomor ... mohon maaf ... Putusan Pengadilan Niaga Makassar, ya, Nomor 87 Tahun 2019. Bahwa Termohon dinyatakan pailit. Nah, tapi di sisi lain ada keterangan dari ... apa ... dari pengadilan negeri niaga ... Pengadilan Niaga Makassar juga menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dalam ... jadi saya bacakan, "Berdasarkan hasil pemeriksaan register induk kepailitan, register induk PKPU, dan sistem informasi penelusuran perkara pada Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap." Itu surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 1 September 2020. Sementara itu, Anda juga lampirkan di sini di Putusan Pailit Nomor 1/Pdt dan segala macamnya itu, Makassar. Ada enggak peristiwa hukum lain di antara kedua kejadian ini yang kemudian mencabut status pailit ... apa namanya ... Termohon?

352. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait.

353. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pihak Terkait, maaf.

354. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan putusan pailit dalam keadaan pailit PKPU itu, Termohon melakukan klarifikasi. Jadi, mendatangi ... apa namanya ... Pengadilan Niaga Makassar dan

mendapatkan surat penjelasan seperti itu sesuai dengan kode barcode yang dikasih, kemudian diverifikasi, dan memang itu benar bahwa surat dari Pengadilan Niaga Makassar.

355. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Betul, jadi kan ada satu suratnya, surat yang ... yang ada gambar ini, itu surat untuk memenuhi syarat, kan, sebagai untuk mencalon, kan (...)

356. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Benar, Yang Mulia.

357. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dinyatakan pailit. Jadi, orang harus punya surat itu semua. Dan itu sudah Saudara lampirkan di sini (...)

358. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Benar, Yang Mulia.

359. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Fotokopinya. Tapi di sisi lain, ada Putusan Pengadilan Negeri ... Pengadilan Niaga Makassar, tanggal 29 April 2019 yang menyatakan ini pailit. Nah, pertanyaan saya, ada enggak bukti lain yang bisa diberikan ke kami atau yang bisa dikemukakan ke kami bahwa antara 29 April ketika Putusan Niaga ini keluar, dengan 1 September 2020, jadi ini setahun lebih, ya, 2019 April sampai September 2020, peristiwa hukum lain yang membatalkan status pailit sebelumnya itu?

360. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Terima kasih, Yang Mulia. Tidak ada peristiwa hukum lain, Yang Mulia.

361. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak ada peristiwa hukum lainnya?

362. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Ya.

363. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, saya cek langsung saja ke Pihak Terkait, ya. Pihak Terkait, berkenaan dengan persoalan ini, bagaimana?

365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Ya, baik. Jadi pada tahun 2019, Yang Mulia, itu ada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1, bertanggal 29 April 2019.

366. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus!

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Namun, pada bulan November (...)

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu mengatakan apa yang nomor 1 itu?

369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Menyatakan kalau tidak salah itu bahwa Prinsipal kami Yermias Bisai dinyatakan pailit.

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pailit?

371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

He em. Terus kemudian, pada pertengahan bulan November itu (...)

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT

November tahun berapa?

373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

2019.

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama, itu tadi yang nomor 1, tahun berapa itu?

375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

29 April 2019.

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT

April, ya?

377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Ya.

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT

April. Nah, itu dinyatakan pailit?

379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Ya, dinyatakan pailit.

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oleh PN Makassar?

381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Ya, oleh PN Makassar. Kemudian, telah dilakukan pembayaran kepada para kreditur oleh Prinsipal kami, Yermias Bisai. Dan kami juga ada bukti, Yang Mulia. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, sebagaimana pengumuman Berita Negara Nomor 101 Tahun 2019, Nomor Pengumuman 1104 menyatakan bahwa berakhirnya kepailitan atas nama Yermias Bisai (...)

382. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu bukti PT berapa?

383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Di PT-5, Yang Mulia. PT-5.

384. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berapa?

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

PT-5.

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT

PT-5?

387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Ya.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Kami print dari laman website kantor berita negara.

390. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Begitu, Yang Mulia, penjelasannya.

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, Pemohon menetapkan sebagai pasangan calon, Pihak Terkait dan Pemohon kapan itu?

393. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Untuk teknis bisa dijelaskan oleh Ketua.

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, oke. Berarti begini, ya, saya ulangi. Pada waktu April dinyatakan pailit, status pailit April 2019?

395. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

2019, betul, Yang Mulia.

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT

2019. Terus pada (...)

397. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Bulan Desember 2019.

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT

November 2019?

399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Ya.

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu sudah tidak dinyatakan pailit?

401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Sudah tidak dinyatakan pailit.

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu dibuktikan dengan pada waktu me-download Berita Negara Nomor 10 itu tadi?

403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Betul, Yang Mulia. Nomor 101.

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Ya.

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, sekarang yang menetapkan ... KPU menetapkannya 2020, ya?

407. TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: ALEKSANDER WOPARI

Ya, Yang Mulia.

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT

2020, bulan apa?

409. TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: ALEKSANDER WOPARI

Bulan September, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal.

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti menurut KPU atau Termohon, yang terakhir yang digunakan untuk menetapkan pasangan calon adalah keterangan yang dilakukan pada bulan Desember itu sudah tidak pailit?

411. TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: ALEKSANDER WOPARI

Benar, Yang Mulia.

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Terima kasih.
Silakan, Prof!

413. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tadi PT berapa? Yang berita negara tadi itu?

414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Mohon izin, PT-5, Yang Mulia.

415. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! Ini PT-5, kami ... saya sedang lihat ini, tapi enggak ada apa-apa, kosong saja di sini.

416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Itu yang di ... dari laman berita negara, ada nomor.

417. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor berapa?

418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Nomor 101.

419. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kok saya tidak menemukan ... Nomor 101?

420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Ya, betul, Yang Mulia.

421. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

2019, Yermias Bisai berakhirnya kepailitan.

422. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

10 Desember 2019.

423. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

10 Desember 2019, ya?

424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Betul, Yang Mulia.

425. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini ada berita negaranya, ya?

426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Betul, Yang Mulia.

427. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, Prof., mohon maaf, Pak Ketua. Jadi ada tiga peristiwa, ya. Satu, dinyatakan pailit, April 2019. Kemudian, 10 Desember 2019 ada pengumuman di berita negara bahwa berakhirnya kepailitan?

428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Betul.

429. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kemudian yang ketiga, ada keterangan dari Pengadilan Negeri ... Pengadilan Niaga Makassar, tanggal 01 Desember 2020?

430. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Betul, Yang Mulia.

431. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Sudah, ini kami yang (...)

432. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Mohon izin, sebelumnya (...)

433. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Biar kami yang menganalisis, yang penting peristiwanya sudah terkapar ... terpapar dengan baik.

434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Oh, baik, Yang Mulia. Terima kasih.

435. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan KPU menetapkan September 2020?

437. TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: ALEKSANDER WOPARI

Benar, Yang Mulia.

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, baik.

Ya, sekarang dari Pihak Terkait. Anda menyampaikan Eksepsi?

439. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait, Yermias Bisai, menyampaikan Eksepsi. Ada 2 Eksepsi, Yang Mulia.

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

441. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Kami sampaikan pokoknya saja.

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pokoknya saja, apa?

443. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Yang pertama. Bahwa dengan selisih perolehan suara sebesar=20,35%, Permohonan Pemohon (...)

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, itu melebihi Pasal 158, ya.

445. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Melebihi pasal ... ya (...)

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang hanya 2%?

447. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Betul.

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Karena memang maksimal untuk bisa mengajukan Permohonan ke Mahkamah (...)

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan.

451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Baik, terima kasih.

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus (...)

453. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Baik.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang kedua?

455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Yang kedua adalah Permohonan obscur libel.

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Kenapa obscur?

457. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Alasannya bahwa terdapat pertentangan antara Petitum angka 2 dan Petitum angka 3 dalam Petitum akhir, Yang Mulia.

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

459. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Pada Petitum 3, Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

460. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

461. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Namun, pada Petitum angka 2, Pemohon juga meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Nomor 411 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 yang dapat dimaknai bahwa Pemohon meminta seluruh perolehan pasangan calon untuk dibatalkan, termasuk juga perolehan suara Pemohon.

462. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik. Terus, sekarang Pokok Permohonan. Apa yang mau direspons?

463. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Pokok Permohonan, Yang Mulia. Kami langsung ke halaman (...)

464. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang mengenai masalah pailit sudah (...)

465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Betul.

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Selesai, ya. Sudah tadi, ya.

467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Sudah selesai mengenai masalah pailit.

468. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Kemudian, kami lanjut mengenai adanya tuduhan bahwa Pihak Terkait sebagai petahana melakukan pelanggaran sistem merit.

Yang pertama. Bahwa terhadap pemberhentian penunjukkan dan pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen, yang bersangkutan tidak menjalankan tugas sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dalam proses pencegahan keputusan rantai Pandemi Covid-19.

470. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Proses tersebut ditujukan semata-mata untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran tugas-tugas terhadap pelayanan pada badan dan tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Waropen.

472. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu poin 8, halaman 7, ya?

473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Betul, Yang Mulia.

474. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, sekarang yang ASN, gimana?

475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Yang kedua, terhadap penunjukan ... pemberhentian, pengangkatan sekwan, Yang Mulia.

476. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

477. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Dapat kami jelaskan bahwa yang bersangkutan sejak bulan Maret 2020 berada di Kabupaten Baik ... Biak dan tidak pernah kembali ke Kabupaten Waropen. Sementara di Kabupaten Waropen, sedang ditunggu untuk pelantikan 19 orang Anggota DPRD Kabupaten Waropen Terpilih Tahun 2019-2024.

478. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Dan juga terdapat pula Surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Waropen Nomor 170 dan seterusnya Perihal Pengusulan Pengisian Jabatan Eselon II dan Eselon III pada Sekda DPRD Kabupaten Waropen.

480. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

481. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Terus, kemudian bahwa kebua ... kedua keputusan bupati tersebut diterbitkan pada tanggal 27 Mei dan 8 Juni 2020.

KPU RI telah melakukan penundaan tahapan pada Pilkada Tahun 2020 yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dalam rangka upaya pencegahan wabah Covid dan tidak ditentukan sampai kapan penundaan tersebut akan berlangsung.

Dan juga, Yang Mulia, berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 179 tersebut, dua keputusan tersebut diterbitkan sebelum KPU RI menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan seterusnya, Serentak Lanjutan Tahun 2020 Nomor 258, tertanggal 15 Juni 2020.

482. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

483. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan dapat untuk ditolak.

484. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

485. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Kami lanjut di halaman 9, Yang ... Yang Mulia.

486. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

487. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Di poin 9 terhadap tuduhan bahwa Pihak Terkait melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) melalui Program Gepemkesmawar (Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen).

488. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

489. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Faktanya, Pihak Terkait sebagai petahana tidak pernah menghadiri pembagian dana Program Gepemkesmawar pada tanggal 19 September 2020.

Bahwa perlu diketahui, Yang Mulia, pada tanggal 19 September tersebut, Pihak Terkait sedang cuti sebagai bupati dan mengenai Program Gepemkesmawar adalah program pemerintah yang sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020 yang berasal dari dana otsus.

Bahwa terhadap tuduhan pelanggaran a quo, tidak pernah ada laporan ke Bawaslu maupun temuan dari Bawaslu Kabupaten Waropen. Karena memang faktanya, program tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku maupun ditujukan untuk memenangkan Pihak Terkait sebagaimana kita ... kami sampaikan dalam Bukti PT-13.

Mengenai sistem noken, Yang Mulia. Kami jawab bahwa di Kabupaten Waropen berdasarkan Keputusan KPU Nomor 810 ... 810 dan seterusnya mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken di Kabupaten Waropen, tidak ada pelaksanaan sistem noken.

490. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, di Waropen ... anu ... ya ... one man one vote, ya?

491. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Ya. Betul, Yang Mulia.

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Terus, kemudian kami lanjut di halaman 11. Terhadap dalil Pemohon pada halaman 23 mengenai tuduhan beberapa pelanggaran yang terjadi pada saat, sebelum, dan sesudah pemungutan suara, terdapat 6 poin.

Kami simpulkan bahwa terhadap 6 poin tuduhan tersebut di atas, kesemuanya dilaporkan oleh Pemohon pada tanggal 12 Desember 2020 setelah Pemohon mengetahui bahwa perolehan suara jauh di bawah Pihak Terkait. Disamping itu, Yang Mulia, dalam dalil-dalil Pemohon a quo, Pemohon tidak dapat menunjukkan signifikansi perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon a quo, tidak terbukti, dan patut untuk ditolak.

Kami lanjut ke Petikum, Yang Mulia, mohon izin.

494. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus, silakan!

495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

496. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang Pihak Bawaslu, saya persilakan! Bagaimana penjelasan Bawaslu mengenai dalil bahwa KPU atau Termohon salah menetapkan pasangan calon karena dia ... apa ... pailit, itu sudah klir atau belum? Kalau tadi di dalam proses ini sudah keliatannya, nanti kita yang menilai, faktanya sudah terungkap. Bagaimana pendapat Bawaslu?

497. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Baik, Yang Mulia. Pendapat Bawaslu terkait dengan pengawasan atas Pokok Permohonan, yang pada intinya menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi syarat TMS sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen karena dinyatakan pailit sejak tanggal 29 April 2019.

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 1/PDT-SUS, dianggap dibacakan, bertanggal 29 April 2019, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen telah melakukan penelusuran informasi di Pengadilan Negeri Makassar, bertemu langsung dengan Ketua Pengadilan Niaga Makassar, Bapak Tito Suhud. Adapun hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Waropen sebagai berikut.

Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/PDT, dianggap dibacakan (...)

498. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

499. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Tertanggal 29 April 2019.

500. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

501. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Bahwa kurator telah melaporkan kepada hakim pengawas tertanggal 6 Januari 2020 tentang pertanggung jawaban mengenai penguru ... pengurusan dan pemberesan harta pailit.

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, seterusnya dianggap dibacakan. Terus?

503. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Bahwa kurator telah memberitahu ... memberitahukan berakhirnya kepailitan kepada debitor melalui penyampaian surat kepada Saudara Yermias Bisai.

504. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan. Terus, yang keempat?

505. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Bahwa kurator telah melaksanakan pemberesan harta pailit, Yermias Bisai dengan melakukan pembagian secara penuh kepada seluruh kreditur Yermias Bisai.

506. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus?

507. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Bahwa kurator telah mengumumkan berakhirnya kepailitan, Yermias Bisai di dua Surat Kabar Harian Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana (...)

508. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Surat Kabar Harian dan Berita Negara, kan? Sesuai dengan ketentuan pasal (...)

509. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Ketentuan Pasal 202 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Bukti PK-3.

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kesimpulannya yang di situ, berarti bagaimana?

511. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Kesimpulan dari hasil penelusuran, Yang Mulia, kami mendapatkan surat balasan dari Pengadilan Niaga Makassar.

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

513. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Pada Bukti PK-4.

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

515. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Yang mana surat balasan dari pengadilan niaga itu menjelaskan terkait status kepailitan dari Saudara Yermias Bisai dengan dilampirkan bukti-bukti yang tadi sudah disampaikan di dalam (...)

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

517. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Terkait telah berakhirnya kepailitan.

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Telah berakhir itu, ya?

519. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar, Yang Mulia.

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga, kesimpulannya sebagai pasangan calon, bermasalah atau tidak kalau begitu, menurut Bawaslu? Sudah tidak bermasalah, kan?

521. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Sudah ... berdasarkan hasil (...)

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena tidak pailit, begitu?

523. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Berdasarkan hasil pengawasan, tidak pailit.

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak pailit? Oke. Berarti kalau begitu, KPU kesimpulannya menetapkan, sudah betul?

525. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Sudah benar.

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sekarang yang lain? Apa yang lain?

527. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Yang kedua, terkait dengan sistem merit.

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Bagaimana?

529. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Yang terkait dengan sistem merit ini perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa kami pada tanggal 17 Juni 2020 menerima laporan dari Saudara Mesak Wonatorei, S.Pd. terkait ... apa ... adanya mutasi jabatan ... pelanggaran mutasi jabatan. Dan kami dari Bawaslu Kabupaten Waropen sudah menindaklanjuti laporan tersebut pada sentra Gakkumdu Kabupaten Waropen hingga pada proses penyidikan dan dihentikan di proses penyidikan oleh penyidik.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terus! Saya tanya, dalam proses rekapitulasi perhitungan suara, di tingkat berapa distrik sih sini? Atau kecamatan?

531. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

11 distrik, 11.

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT

11 distrik. Ada persoalan-persoalan di 11 distrik itu? Ada laporan?

533. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Untuk persoalan, kami pada saat tanggal 9 menerima satu temuan terkait dengan ... apa ... adanya pelanggaran pada TPS 03 Kampung Nanomi. Dimana Bawaslu telah merekomendasikan untuk pemungutan suara ulang dan kami juga telah merekomendasikan untuk

pelanggaran tindak pidana dan sudah putusan hingga di pengadilan untuk para pelaku.

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ada kaitannya dengan Pihak Terkait, enggak, itu?

535. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Tidak ada, Pak Hakim.

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada? Oke, terus! Pada waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten, ada persoalan?

537. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, tidak ada persoalan.

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada persoalan. Pada waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten, ada keberatan?

539. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Pada saat rekapitulasi, keberatan dari ... apa (...)

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasangan calon nomor berapa yang keberatan?

541. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Pasangan Calon Nomor Urut 3.

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Urut 3. Keberatannya mengenai, apa?

543. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Terkait dengan tidak menandatangani hasil rekapitulasi tingkat kabupaten.

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kok tidak tanda tangan, kenapa? Karena berhubungan dengan ... tadi yang pertama karena dia Termohon ... Pihak Terkait itu pailit atau karena perhitungan suara?

545. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Terkait dengan ada perhitungan suara.

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

547. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Dan juga kemungkinan pailit.

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gitu, oke. Terus yang penghitungan suara itu, di mana?

549. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Penghitungan suara itu, Pemohon ... terkait dengan ada persoalan pada TPS di ... menyampaikan ada masalah pada TPS ... TPS 1 Kampung Syewa/Mirare, Distrik Wapoga.

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa di TPS 1 itu?

551. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Pemohon menyampaikan dalam pleno rekapitulasi bahwa ada terjadi sistem noken yang terjadi.

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada sistem noken?

553. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar, Yang Mulia.

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Padahal, sebetulnya tidak ada sistem noken, kan di situ?

555. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS kami (...)

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

557. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Menyampaikan bahwa proses yang dilaksanakan sesuai dengan proses secara nasional (...)

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, tidak di ... ada sistem noken. Berarti tidak terjadi sistem noken di situ, ya?

559. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar. Dari hasil (...)

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pengawasan?

561. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Pengawasan dari pengawas TPS kami, Yang Mulia.

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Apa lagi yang akan disampaikan? Cukup? Ada lagi?

563. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Terkait dengan perolehan.

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ini Saudara di sini menyantumkan perolehan suara hasil pengawasan dari semua kecamatan, ya?

565. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar, Yang Mulia.

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, Anda merekap hasil akhir itu di halaman 19. Itu sudah betul itu, Bukti P-41 itu?

567. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar, Yang Mulia.

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, Pasangan Nomor 1=3.751. Pasangan Nomor 2=1.861. Pasangan Nomor 3=9.990. Pasangan Nomor 4=16.529, itu betul?

569. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar, Yang Mulia.

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul. Dan di situ tadi sudah tidak ada sistem noken?

571. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar, Yang Mulia, tidak ada.

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ini anu, ya, Bukti P-41, ya, Saudara, ya?

573. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar, Yang Mulia.

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, keterangan Anda ini dibuat oleh seluruh anggota Bawaslu dalam rapat pleno?

575. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar, Yang Mulia.

576. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Disetujui oleh tiga-tiganya?

577. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar.

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada dissenting atau tidak ada yang tidak setuju?

579. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Tidak, Yang Mulia.

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Prof. Saldi, silakan, kalau ada!

581. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ini terima kasih. Ke Pemohon, ya, Pemohon Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021.

582. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021: EVA YULIANTI

Ya, Yang Mulia.

583. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu yang dikatakan noken itu di berapa TPS yang ... yang apa ... yang terjadi?

584. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021: EVA YULIANTI

Yang terjadi berdasarkan bukti yang telah kami sampaikan, itu ada Bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti P-12, Yang Mulia. Memang itu di TPS 1 Syewa/Mirare itu memang dilakukan noken sebagaimana (...)

585. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan, pertanyaan saya, berapa TPS?

586. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021: EVA YULIANTI

1 TPS, Yang Mulia.

587. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

1 TPS?

588. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021: EVA YULIANTI

Ya, Yang Mulia.

589. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih.
Terima kasih, Pak Ketua.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya minta klarifikasi lagi kepada KPU Termohon. Betul itu, Termohon, di 1 TPS itu ada noken? KPU, langsung saja! Kalau menurut Bawaslu, tidak ada sistem noken. Kalau KPU, gimana, Termohon?

591. TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: ALEKSANDER WOPARI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Di Distrik Wapoga, Kampung Syewa/Mirare itu melakukan sesuai dengan prosedur. Apa yang disampaikan oleh Bawaslu itu benar.

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terima kasih. Ya, cukup. Baik.

Terima kasih. Jadi, Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2020 sudah selesai.

Sekarang Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2020, Pak Pieter yang mau menyampaikan seperti tadi?

593. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Terima kasih, Yang Mulia.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sistematis, gitu?

595. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2020, Yang Mulia.

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2020, sori.

597. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ada renvoi di halaman 2.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

599. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Tertulis dalam ambang batas, Legal Standing itu 17,26%, seharusnya 45,65%.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

601. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Sehingga sudah sangat jauh, teramat jauh melampaui ambang batas.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, anu ... ya, Eksepsi Saudara bahwa Permohonan ini melewati ambang batas?

603. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Ya.

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang semestinya berapa persen?

605. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

2%, Yang Mulia.

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT

2%. Ini 45,65%?

607. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Betul, Yang Mulia.

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, ada Eksepsi lain?

609. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Eksepsi lain itu tentang kewenangan mengadili dan juga Permohonan obscur.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, dianggap dibacakan.

611. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Ya.

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang, apa hal-hal yang penting dari dalil-dalil Pemohon?

613. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Ya, Pokok Permohonan Pemohon itu, antara lain bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara 6.138 dari pemilih nusantara.

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

615. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Pemilih nusantara.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

617. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Bahwa dalil tersebut memang tidak benar. Karena tidak ada rekomendasi maupun maupun ... atau pun putusan Bawaslu yang menjelaskan tentang pengaduan dari Pemohon.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

619. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Kemudian, yang berikut tentang adanya sistem noken yang di klaim oleh Pemohon. Tidak benar juga karena sesuai dengan SK KPU RI dan KPU Provinsi, PKPU itu Waropen tidak termasuk wilayah yang menggunakan sistem noken.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan di dalam pelaksanaannya juga tidak ada sistem noken, ya?

621. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Ya, one man one vote.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus?

623. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Kemudian, Pemohon juga mendalilkan bahwa seharusnya memperoleh suara 12.201.

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

625. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Ternyata, Permohonan ini kabur karena tidak dijelaskan, bagaimana memperoleh suara sebanyak itu, dan di TPS-TPS mana saja, dan di distrik-distrik mana saja? Jadi, ini hanya imajinasi dari Pemohon.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

627. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Untuk itu, Termohon menolak dalil Pemohon.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

629. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Kemudian, perolehan suara lain dalam TPS yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Itu semuanya tidak benar karena tidak menjelaskan secara rinci dan tegas, bagaimana memperoleh suara dan di TPS-TPS mana saja?

Kemudian, soal pemilih yang tidak mendapat undangan dan di ... yang tidak mendapat undangan, itu juga tidak benar.

Yang berikut, yang lainnya dianggap dibacakan. Dan akhirnya kami tiba pada Petitum.

Yang pertama. Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Yang pertama. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.026 dan seterusnya.

Dan yang ketiga. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 yang benar adalah:

Nomor Urut 1, perolehan suara=3.751 atau 3.751.

Nomor Urut 2=1.861 (1.861).

Nomor Urut 3=9.990 (9.990).

Dan Nomor 4=16.529 (16.529).

Jumlah suara sah=32.131 (32.131) atau setara dengan 100%.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

631. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER ELL

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Prof. Saldi, ada? Cukup. Yang Mulia Pak Manahan? Cukup.

Sekarang berikutnya Pihak Terkait, silakan!

633. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait di sini mengajukan Eksepsi, Yang Mulia.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

635. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Eksepsi yang pertama adalah terkait ambang batas.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Melebihi ambang batas, ya?

637. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Ya, tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2).

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

639. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Dimana keberadaan dari Pemohon masuk pada peringkat terbawah dari empat pasangan calon.

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

641. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Dengan selisih angka dengan Pihak Terkait mencapai sejumlah 14.668 suara.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Yang lain dianggap dibacakan. Itu persentasinya, kan jelas itu, ya?

643. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Ya. Kemudian, Eksepsi terkait Eksepsi Permohonan obscur liber.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Obscur, ya.

645. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Dimana (...)

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Narasinya dianggap dibacakan.

647. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Ya. Ini intinya terdapat pertentangan antara Petikum angka 2 huruf a dengan Petikum angka 2 huruf b (...)

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

649. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Yang selanjutnya dianggap dibacakan.

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, Anda kesimpulannya ada contradictio, ya?

651. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Ya.

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Antara dalil, juga antara Petitum yang satu dengan Petitum yang lain?

653. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Ya, Yang Mulia.

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, sekarang Pokok Permohonannya?

655. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Untuk yang ini, Eksepsi yang ketiga, Yang Mulia?

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Eksepsi yang ketiga?

657. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Terkait sengketa atas penetapan DPT dan/atau money politics, itu menjadi pem ... kewenangan (...)

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu mestinya diselesaikan oleh badan yang lain, ya, institusi lain?

659. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Ya, itu, Yang Mulia.

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gakkumdu dan Bawaslu, ya?

661. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Ya, Yang Mulia.

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus?

663. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Kemudian, kami masuk ke Pokok Perkara.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pokok Perkara?

665. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Ya, Yang Mulia. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait.

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

667. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Namun, tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait.

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

669. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Kemudian, kami masuk ke 2.7, angka 9 ... halaman 9. Dimana bahwa terhadap dalil angka 3 huruf a halaman 5, Permohonan tentang pemilih dari warga negara ... warga nusantara, penduduk pendatang, atau penduduk ... Paslon Nomor Urut 2 yang dipengaruhi hak pilihnya dengan cara tertentu sebanyak=1.709 pemilih adalah tidak benar. Tidak benar karena dalil a quo kabur, tidak dapat menunjukkan siapa yang memengaruhi, dan siapa ... atau paslon mana yang diuntungkan. Dan Pemohon tidak dapat memastikan bahwa ke-1.709 pemilih tersebut seandainya memilih, akan memberikan suaranya semua kepada Pemohon karena sifatnya luber, jurdil dalam memilih.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

671. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Kemudian. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 huruf a, halaman 5. Permohonan tentang pemilihan Paslon Nomor Urut 5 yang terpengaruh supaya memilih paslon lain, seperti yang tidak menerima undangan untuk memilih di TPS terdapat=1.507 pemilih pendukung Pemohon adalah tidak benar. Tidak benar karena dalil a quo kabur, tidak dapat menguraikan siapa yang memengaruhi supaya memilih paslon lain, serta tidak pula menunjukkan bahwa sejumlah 1.507 pemilih tersebut benar-benar pendukung militan Pemohon yang dipastikan memilih Paslon Nomor Urut 2.

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

673. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Kemudian, kami lanjutkan.

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

675. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Selanjutnya. Bahwa dalil Permohonan ... bahwa dalil Permohonan yang menyatakan pelaksanaan di 2 distrik dengan menerapkan sistem noken adalah tidak benar. Dalil a quo tidak benar karena selain kabur, tidak menyebutkan di distrik mana yang dimaksud diselenggarakan noken, juga pada kenyataannya dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Waropen tidak ada yang menggunakan sistem noken.

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

677. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Bahwa penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Waropen telah sesuai dengan ketentuan karena Waropen memang tidak termasuk kabupaten pemungutan suara dapat menggunakan sistem noken, atau ikat suara, atau pun kesepakatan.

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

679. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Kemudian ke 2.13. Bahwa dalil pemilih pendukung Paslon Nomor Urut 2 yang dipengaruhi untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 di 2 distrik, yaitu Distrik Urfas dan Distrik Waropen Bawah sebanyak=1.127 pemilih, hal tersebut adalah tidak benar. Dalil a quo tidak benar karena dalam konstelasi pemilihan untuk memilih kepala daerah atau wakil kepala daerah, para peserta dan tim sukses diperbolehkan melakukan tindakan memengaruhi warga dengan in ... warga Indonesia yang mempunyai hak pilih dengan berkampanye agar memilih dirinya. Pemohon tidak menguraikan dengan cara bagaimana tindakan memengaruhi pendukungnya dan tidak dapat pula memastikan bahwa 1.127 pemilih tersebut adalah benar-benar tidak bisa ke lain hati Pemohon.

Kemudian 2.15, halaman 11. Bahwa sebagai tanggapan terhadap alat bukti yang daftarnya termuat dalam Permohonan angka 5, halaman 6 sampai 8, Pihak Terkait menegaskan bahwa Bukti-Bukti P-6 sampai P-21 berbentuk formulir laporan dari berbagai ... beberapa kejadian, bukan berbentuk rekomendasi Bawaslu.

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, itu baru berupa anu ... laporan, ya?

681. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Ya.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus?

683. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Berbentuk ... bukan berbentuk rekomendasi Bawaslu atas laporan ter ... beberapa kejadian. Sepanjang bukti yang diajukan masih sebatas berbentuk laporan, maka bisa jadi laporan dimaksud memang masih dalam proses atau pun memang tidak terbukti.

Dengan demikian, maka bukti-bukti tersebut tidak cukup untuk menguatkan dalil Pemohon tentang telah terjadinya pelanggaran yang memengaruhi keterpilihan pasangan calon.

Bahwa demikian pula terhadap daftar alat bukti pada halaman 10 sampai halaman 11, Permohonan yang oleh Pemohon disebut dengan istilah temuan atas pelanggaran-pelanggaran di Distrik Urei Faisei, alat bukti tersebut tidak cukup untuk menguatkan dalil pelanggaran versi Pemohon, sepanjang tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Waropen atas dugaan temuan-temuan pelanggaran dimaksud.

Nah, kami teruskan ke Petitem, Yang Mulia.

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

685. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: SUPRIYADI ADI

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.06.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum dari Pihak Terkait. Cukup, Yang Mulia.

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Yang Mulia Pak Manahan, ada? Cukup. Prof. Saldi? Cukup.

Ya, yang terakhir dari Bawaslu, ya. Ringkas seperti tadi, pokok-pokoknya saja, saya persilakan!

687. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Baik, Yang Mulia. Kami sampaikan Pokok Permohonan atas ... keterangan atas Pokok Permohonan Pengadu.

Hasil pengamatan ... pengawasan atas Pokok Permohonan halaman 5, angka 3, huruf a, yang pada intinya menyebutkan terdapat 6.138 pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya dengan alasan dipengaruhi hak pilihnya sebanyak 1.709 pemilih warga nusantara dan juga pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta selebihnya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil (...)

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kesimpulannya saja, yang D itu.

689. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menemukan dan menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilihan berupa memengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu.

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau A, B, C-nya kan prosesnya, ya, kan?

691. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar.

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang terus yang nomor dua?

693. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Yang kedua, hasil pengawasan atas Pokok Permohonan halaman 5, angka 3, huruf b. Pada intinya menyebut ... menyebutkan pemilih pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dipengaruhi hak pilihnya untuk memilih pasangan calon lain, yaitu tidak diberikan undangan untuk memilih sebanyak 1.507 pemilih, direkayasa hak pilihnya menggunakan sistem noken berjumlah 2.347 pemilih di dua distrik, dipengaruhi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 di dua distrik, yaitu di Distrik Urei Fasei dan Waropen Bawah sebanyak 1.127 pemilih dari sisa ... dan sisa dari 6.318 pemilih telah memilih pasangan calon lain, termasuk surat suara yang rusak.

Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan sebagai berikut (...)

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan.

695. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Dianggap dibacakan.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kesimpulannya itu yang mulai E itu? Bagaimana itu? Kok Saudara mengatakan ada sistem noken? Coba, E itu dibacakan!

697. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menemukan dan menerima laporan dari pasangan calon maupun masyarakat terkait dugaan pelanggaran memengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu.

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini saya minta ketegasan. Ada sistem noken dipraktikkan di dua anu tadi, di Distrik Urei Fasei sama Distrik Waropen Bawah?

699. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Tidak, Yang Mulia.

700. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

701. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Tidak, Yang Mulia.

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini coba, E ini. Bahwa tidak terdapat keberatan terkait adanya pelaksanaan sistem noken dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 saat pelaksanaan rekapitulasi hasil, ini bagaimana ini?

703. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Yang Mulia, kami renvoi ini ada salah penulisan.

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Yang betul, lho, ini Anda? Ini keterangan Anda keterangan di bawah sumpah jabatan. Jangan berubah-ubah, lho.

705. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar, Yang Mulia. Ini kami renvoi, ada kesalahan penulisan dalam (...)

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ada sistem noken atau tidak? Ini ketegasan?

707. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Tidak, Yang Mulia.

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

709. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Tidak.

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini Anda ke sini atas nama jabatan Bawaslu yang sudah disumpah.

711. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar, Yang Mulia.

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini keterangan Anda tertulis yang E mengatakan, "Ada sistem noken, tapi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak keberatan." Ada enggak sistem noken?

713. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Tidak, Yang Mulia.

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak, ya?

715. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Siap, Yang Mulia. Tidak ada.

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada?

717. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Tidak ada.

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Berarti yang E ini salah keterangan Anda?

719. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Salah, Yang Mulia.

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada sistem noken. Kenapa sekarang berubah? Tadinya begini kok, Anda sekarang mengatakan tidak ada sistem noken?

721. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Memang benar, Yang Mulia. Untuk Distrik Urfas dan Distrik Waropen Bawah tidak ada sistem noken.

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada?

723. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar, Yang Mulia.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus kemudian, kesimpulannya tidak ada?

725. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Tidak ada, Yang Mulia.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus, berikutnya?

727. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Berikutnya. Tiga, hasil pengawasan atas Pokok Permohonan halaman 6, angka 3, huruf c, pada intinya menyebutkan adanya money politics dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 di 9 distrik dan 70 kampung atau desa terhadap 5.511 pemilih pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menerangkan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen pada tanggal 14 Desember 2020 menerima laporan dari Saudara Betel Ramandey terkait adanya dugaan pelang (...)

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, setelah diklarifikasi, tidak datang, pelapor? Ya, betul? Namun, sampai batas waktu yang tersebut, pelapor tidak melengkapi laporannya. Ya, kan?

729. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar, Yang Mulia.

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena tidak melengkapi laporannya, maka tidak jadi diproses, tidak diteruskan, kan, gitu?

731. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Tidak memenuhi syarat formil, materiil, Yang Mulia.

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya. Terus, yang berikutnya?

733. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Yang keempat, hasil pengawasan atas Pokok Permohonan halaman 6, angka 5, pada intinya menyebutkan adanya temuan pelanggaran pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, yang terlampir dalam tabel dengan kode Alat Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-24.

Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Waropen menyampaikan sebagai berikut (...)

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kesimpulannya, apa? Laporan-laporan itu kesimpulannya, bagaimana? Semua laporan itu tidak terbukti, diteruskan, atau ada rekomendasi?

735. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Laporan ... kesemua laporan itu tidak memenuhi syarat formil, materiil, Yang Mulia.

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, tidak bisa ditindaklanjuti?

737. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Tidak bisa ditindaklanjuti.

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga tidak memunculkan satu rekomendasi, gitu?

739. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar, Yang Mulia.

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, yang tambahan, apa?

741. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Cukup, Yang Mulia.

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah tidak ada? Cukup? Ini Anda, kan menulis juga ada tambahan di luar Pokok Permohonan. Apa yang penting yang Anda ... anukan? Tidak ada persoalan dalam penentuan rekapitulasi di tingkat kabupaten? Atau Bawaslu tidak menemukan pelanggaran lain?

743. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak pernah menerima laporan atau menemukan pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan (...)

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perselisihan hasil?

745. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Ya, benar, Yang Mulia.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Nah, ini kembali saya tegaskan ini, supaya Mahkamah betul-betul diyakinkan, ya. Karena tadi dari Pihak Ter ... Pemohon mengatakan, "Ada noken."

Kemudian, dijawab oleh Termohon, "Tidak ada noken."

Pihak Terkait mengatakan, "Tidak ada noken."

Anda di halaman 5 pada huruf e mengatakan, "Ada noken, tapi tidak ada keberatan."

Sekarang di sini diralat, tidak ada noken. Yang betul itu, gimana? Penegasan Anda sekali lagi!

747. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Yang benar itu tidak ada noken, Yang Mulia.

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul, ya?

749. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar, Yang Mulia.

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan karena Anda itu takut sekarang kepada Pihak Terkait Prinsipalnya, kemudian sekarang berubah?

751. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Tidak, Yang Mulia.

752. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan ... tidak, ya?

753. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar, Yang Mulia.

754. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena Saudara keterangan yang betul, yang jujur itu disampaikan di Mahkamah.

755. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar, Yang Mulia.

756. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mahkamah bisa memerintahkan kepada polisi, Anda kalau diancam, berarti nanti bisa kita perintahkan supaya diamankan oleh poli ... polisi, sehingga Anda bebas dari ancaman itu. Yang penting adalah Anda melakukan atau menerangkan sejujurnya apa yang terjadi. Gimana, betul tidak ada noken?

757. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Tidak ada noken, Yang Mulia.

758. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, ya (...)

759. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Untuk Distrik Urfas dan Waropen Bawah, Yang Mulia.

760. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini kok bisa tulis begini, kenapa ini?

761. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Mohon maaf, Yang Mulia. Kami salah penulisan dari operator kami.

762. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini ditandatangani oleh ... anu ... lho, ya, 3 komisioner lho, ya. Ketua, Marice Alfonsina, Nikolas Imbiri, dan Jenny, ya, yang tanda tangan. Betul, ya?

763. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar, Yang Mulia.

764. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini Anda ... Anda siapa namanya?

765. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Nikolas Imbiri.

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nikolas. Mau ... Marice, ada orangnya?

767. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Marice ada.

768. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Marice. Di mana sekarang?

769. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Ada lagi daring di Bawaslu.

770. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Daring. Terus, kemudian Jenny?

771. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Jenny, sama.

772. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Daring?

773. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Daring di Bawaslu RI.

774. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang hadir, enggak?

775. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Hadir.

776. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba, disambungkan ke sana! Saudara Marice dan Saudara Jenny yang hadir daring di Bawaslu. Coba, disambungkan! Tolong disambungkan, Petugas! Yang hadir secara daring dari Bawaslu Kabupaten Waropen.

777. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: MARICE ALFONSINA NIKI

Ya, sudah.

778. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ini Saudara Marice, yang mana? Ada Marice?

779. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: MARICE ALFONSINA NIKI

Siap, Yang Mulia.

780. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Saudara Jenny? Baik (...)

781. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: JENNY RAHEL MAYOR

Siap, Yang Mulia.

782. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Tadi mendengarkan suara apa yang disampaikan Nikolas? Gimana?

783. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: MARICE ALFONSINA NIKI

Mohon izin, Yang Mulia. Benar, khusus untuk di Kabupaten Waropen, Distrik Waropen Bawah dan Distrik Urei Faisei tidak ada sistem noken. Dan khusus Waro ... Waropen tidak termasuk salah satu kabupaten yang menggunakan sistem noken. Terima kasih, Yang Mulia.

784. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada sistem noken, ya. Baik. Sekarang satunya, Marice, yang mana? Betul tidak ada noken di sana?

785. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: MARICE ALFONSINA NIKI

Siap, Yang Mulia.

786. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini tadi yang ngomong, siapa? Marice? Sekarang Jenny? Saudara Jenny? Ada enggak diselenggarakan secara noken di sana? Ya, silakan dijawab!

787. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: JENNY RAHEL MAYOR

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan Kabupaten Waropen, Distrik Urei Faisei dan Waropen Bawah tidak ada sistem noken.

788. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada, ya?

789. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: JENNY RAHEL MAYOR

Ya.

790. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, terima kasih kepada Saudara Marice dan Saudara Jenny, ya.

Ya, gitu, Pak Nikolas, ya?

791. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Baik, Yang Mulia.

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, semua Bawaslu yang Komisioner, tiga-tiganya mengatakan bahwa tidak ada noken?

793. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar, Yang Mulia.

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terima kasih. Ada yang akan disampaikan, Prof. Saldi, cukup? Yang Mulia? Cukup?

Sebelum saya akhiri, ada yang akan disampaikan dari seluruh Pihak?

795. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021: EVA YULIANTI

Izin, Yang Mulia.

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

797. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021: EVA YULIANTI

Dari Pemohon Nomor 99/PHP.BUP-XIX/202. Tadi saya hanya mengoreksi bukti, Yang Mulia. Tadi salah nomor bukti, mohon izin, Prof. Saldi. Bahwa untuk bukti kami, untuk adanya sistem noken di TPS 1 Syewa Merare itu Bukti di P-13 dan P-14, Yang Mulia, bukan P-10, P-11, P-12. Itu bukti adanya pembagian uang kalau itu, Yang Mulia.

Kalau yang betul adalah Bukti P-13 dan P-14. Terima kasih, Yang Mulia.

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ya. Sudah, Prof? Terima kasih.

Baik, kalau begitu, sekarang saya akan mengesahkan bukti yang diajukan oleh Para Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Ini Pemohon mengajukan tambahan Bukti P-6 dan P-7, ya, Balikpapan? Betul? Baik.

Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-42?

799. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Betul, Yang Mulia.

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pada keterangan di Daftar Alat Bukti T-8 tertulis PPS Telaga Sari, pada alat bukti tertulis PPS Klandasan Idir, yang benar yang mana ini, Termohon?

801. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Izin, Yang Mulia, ada PPS Telaga Sari dan ada PPS Klandasan Idir, Yang Mulia.

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, ini yang perkara ... anu kok ... Bukti yang T-38. T-38 tertulis PPS Telaga Sari, tapi pada alat bukti tertulis PPS Klandasan Idir, yang betul pasti alat bukti fisiknya, kan?

803. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Betul, Yang Mulia.

804. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, kita sesuaikan, ya, daftar alat buktinya, ya?

805. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Siap, Yang Mulia.

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-13?

807. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUS AMRI

Yang Mulia, sampai PT-13.

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-17?

809. BAWASLU KOTA BALIKPAPAN: AGUSTAN

PK-17, Yang Mulia, ya.

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Disahkan, ya, seluruhnya.

KETUK PALU 1X

811. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Siap, Yang Mulia.

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, sekarang Perkara 100 ... Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 dahulu. Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021, Pihak Pemohon sudah tidak mengajukan bukti tambahan, yang sudah disahkan kemarin.

Termohon, T-1, T-17, T-17.1, T-17.7, T-18, T-18.1 sampai dengan T-18.7, betul? Betul, ya? Dijawab pakai mik supaya terekam!

813. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAN RAMLI

Benar, Yang Mulia.

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-44, betul?

815. BAWASLU PROVINSI PAPUA: AMANDUS SITUMORANG

Benar, Yang Mulia.

816. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, yang terakhir Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021.

817. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Mohon izin, Yang Mulia.

818. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mana? Dari mana ini?

819. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Pihak Terkait Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021, belum disahkan.

820. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, belum disahkan?

821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Betul.

822. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah, PT-1 sampai dengan PT-14, ya? Sudah toh? Saya sudah sebut tadi PT-1 sampai dengan PT-14.

Sekarang Perkara 106/PHP.BUP-XIX/2021. Pemohon menambahkan Bukti P-23, P-23.A, P-24, P-26, P-245 sampai dengan P-45, betul?

823. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: OKTOVIANUS BOBOY

Benar, Yang Mulia.

824. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini kapan mengajukannya ini?

825. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: OKTOVIANUS BOBOY

Jumat.

826. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jumat, hari apa? Jumat (...)

827. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: OKTOVIANUS BOBOY

Hari Jumat minggu lalu.

828. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waduh, saya kan ... persidangannya hari, apa? Persidangannya hari Selasa ... Selasa. Berarti ini tidak bisa diterima P-23 sampai dengan P-45 tadi.

829. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: OKTOVIANUS BOBOY

Itu tambahan bukti.

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Saya sampaikan di dalam persidangan hari Selasa. Sebelum persidangan selesai pada hari Selasa, boleh mengajukan bukti tambahan. Selewatnya sidang ditutup, bukti tambahan sudah tidak dapat diterima. Kalau perkara Saudara nanti lewat menjadi perkara yang dilanjutkan, maka bukti itu masih bisa disampaikan pada waktu persidangan selanjutnya, begitu.

Berarti ini tidak bisa disahkan, ya, sementara lewat, ya. Karena disampaikan hari Jumat, padahal sidangnya hari Selasa. Baik.

Kemudian, Termohon ... Termohon T-1, T-17, T-17.1, T-17.13, T-18, T-18.1, T-18.10, T-19, T-19.1, dan T-19.10, betul, Termohon?

831. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAN RAMLI

Benar, Yang Mulia.

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-44?

833. BAWASLU KABUPATEN WAROPEN: NIKOLAS IMBIRI

Benar, Yang Mulia.

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-6?

835. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XIX/2021 DAN NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Benar, Yang Mulia.

836. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kemudian ini yang P-Pemohon sudah tidak bisa karena diserahkan pada hari Jumat, ya, sehingga yang disahkan adalah bukti Termohon sebagaimana saya sebutkan, bukti Pihak Terkait juga sebagaimana yang saya sebutkan, dan bukti dari Bawaslu sebagaimana yang saya sebutkan, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk semua Pihak. Persidangan yang kedua ini sudah selesai dan Saudara perlu saya sampaikan kepada Saudara-Saudara semua. Bahwa persidangan berikutnya menunggu setelah Mahkamah atau Majelis Panel melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim akan kita laporkan, bagaimana Pemohon menyampaikan Permohonannya, Pihak Termohon menyampaikan Jawabannya, Pihak Terkait menyampaikan Keterangannya, dan Bawaslu menyampaikan Keterangannya. Setelah itu, Rapat Permusyawaratan Hakim, 9 orang Hakim akan memutuskan, apakah perkara ini lanjut atau berhenti sampai di sini, ya? Ada putusan yang memberhentikan dan ada putusan dianu ... perkara ini dilanjutkan pada persidangan yang akan datang.

Mengenai persidangan yang akan datang untuk perkara yang lanjut, akan diberitahukan oleh Kepaniteraan. Ya, cukup? Ada lagi yang akan disampaikan?

837. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Cukup, Yang Mulia.

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, baik. Semuanya cukup, ya? Baik. Kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.49 WIB

Jakarta, 1 Februari 2021
Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

